BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakan

Undang-undang dasar 1945 telah mengatur mengenai dasar-dasar aturan perekonomian nasional yang tercantum pada pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam pasal ini jelas bahwa kebangkitan ekonomi tidak serta merta melibatkan beberapa golongan saja tetapi kebangkitan ekonomi itu harus dapat melibatkan seluruh masyarakat indonesia dari berbagai lapisan masyarakat (Rachbini, 2004)

Kebangkitan ekonomi itu juga harus memberikan dampak positif terhadap koperasi sebagai usaha bersama masyarakat, bukan malah menghancurkanya karena bermunculan investasi-investasi asing ke indonesia. Kemudian ada pasal 33 ayat (2) UUD 45 menyebutkan cabang –cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (Rachbini, 2004).

Kaitanya pada pasal ini bahwa pemerintah harus dapat menjaga cabang-cabang produksi milik Negara yang penting, untuk tetap dikuasai oleh Negara. Selanjutnya pada pasal 33 ayat (3) UUD 45 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Rachbini, 2004).

Pembangunan ekonomi yang dilakukan Negara-negara berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteran bagi seluruh rakyatnya. Pembagunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemertaan pendapatan setiap daerah. Hakikat pembaguanan adalah membentuk manusia-manusia atau individu mengaktualisasikan segala pontensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu kegiatan dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola semburdaya-sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan pembaguanan. Dengan Pengelolaan tersebut disesuaikan dengan kebutuha daerah yang bersangkutan sehingga tidak terjadi *inefisiensi* dalam penggunaan sumber daya. Pembaguanan ekonomi daerah juga dilakukan dengan menghindari terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberikan kemakmuran terhadap masyarakat sekaligus menekan efek negatif dari pembagunan seminimal mungkin.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuatif (kenaikan dan penurunan) persentase PDRB menurut lapangan usaha. Tenaga kerja dianggap penting dalam hal pembangunan, karena tenaga kerja merupakan modal bagi pembangunan. Dalam Islam tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi, karena semua

kekayaan alam tidak berguna apabila tidak diekploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandinga, baik perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional, suatu sektor dikatan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaingdengan sektor yang sama dengan negara lain. Sektor unggulan menurut Tumenggung (1996) adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dengan ke unggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar.

Sektor ekonomi akan mengalami perubahan selam proses pembanguan berlangsung. Begitu pula persentase penduduk yang bekerja diberbagai sektor ekonomi jaga akan mengalami perubahan. Pembangunan daerah akan berdampak pada peningkatan sektor-sektor perekonomian. Hal ini tidak lepas dari pembangunan su,ber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupankan masalh penting dalam pembangunan daerah. Tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembaguan suatu daerah secara keseluruhan.Sehinggah kondisi ketenaga kerjaan dapat juga mernggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejah teraan penduduk di suatu wilaya dalam kurun waktu tertentu.

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembagunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembagunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pengertian tenaga kerja itu sendiri menurut Undang-undang 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat 2 di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaanyaguna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Faktor tenaga kerja merupakan bagian tidak terpisah dalam suatu proses pembangunan. Faktort tenaga kerja tidak saja hanya dipandang sebagai suatu bagian unit dalam penciptaan output, tetapi juga bagiman kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainya untuk menciptakan suatu nilai tambah (produktivitas). Semakin produktif tenaga kerja berdampak pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan. Selain pasar uang dan pasar barang,pasar tenaga kerja juga menentukan bekerjanya suatu sistem ekonomi pembagunan

Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapata bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Tenagah kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenga kerja adalah mereka yang dianggap

tidak mampu dan tida mau bekrja, meskipun ada permintaan bekerja. Munurut Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk diluar usia, yaitu mereka yang berusian dibawah 15 tahun dana berusia diatas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiun, para lansia (lanjut Usia) dan anak-anak.

Dampak dari pengaruh penyerapan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Parepare perlu dibuktikan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan peneletian yang berjudul ***"Analisis Sektor Unggulan Dan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Unggulan di Kota Parepare"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan Di Kota Pare-Pare Tahun 2014-2018?
2. Sektor apakah yang termasuk dalam sector unggulan Di Kota Pare-Pare Tahun 2014-2018
3. Sektor apakah yang todak termasuk dalam sector unggulan Di Kota Pare-Pare tahun 2014-2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasrkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan di kota pareapare 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

1. penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan dalam perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang kini penulis tempuh.

2. penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah hasanah pengetahuan menger potensi penyerapan tenaga dikota parepare

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya orng yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga mempunyai daya pikir dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah namun tidak memiliki tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik maka keberadaan sumber daya alam tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya pada suatu wilayah yang sedikit memiliki sumber daya namun tenaga kerjanya memiliki skill yang tinggi, atau banyak tenaga kerjanya yang memiliki motivasi kerja dan keahlian yang tinggi maka sumber daya alam yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah

tersebut. Diantara faktor produksi tersebut, tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi melebihi faktor yang lainnya seperti tanah, modal dan yang lainnya. Proses produksi tidak akan berjalan apabila tidak ada manusia yang mengendalikannya sekalipun teknologi yang digunakan sudah sangat modern.

Menurut (Haryo 2002) penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sector perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar berarti memiliki sumber daya yang besar pula. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berupa tenaga kerja harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tenaga kerja yang ada harus mampu diserap oleh semua kegiatan dan sektor ekonomi. Penyerapan tenaga kerja bisa dikaitkan dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, yang di mana permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan (Fuad, 2013). Dalam dunia kerja atau dalam hal penyerapan tenaga kerja setiap sektornya berbeda-beda untuk penyerapan tenaga kerjanya, misalnya saja tenaga kerja di sektor formal. Penyeleksian tenaga kerjanya di butuhkan suatu keahlian khusus, pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk bias bekerja pada

sektor formal. Usaha perluasan lapangan pekerjaan dapat dilakukan untuk menyerap tenaga kerja dengan dua cara:

a. Pengembangan industri yaitu jenis industri yang bersifat padatkarya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam industri termasuk industri rumah tangga.
b. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum, misalnya pembuatan jembatan, jalan raya atau bendungan.
c. Faktor-faktor penyerapan tenaga kerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan dibawah ini.

a. PDRB riil (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut Gross Domestic Product, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product).

b. Kekakuan Upah (Wage Rigidity)

Indikasi adanya kekakuan upah (wage rigidity) adalah kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Kekakuan upah merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Secara teoritis, untuk

mempertahankan tingkat pengangguran alamiah (natural rate of unemployment) sama dengan tngkat aktualnya (actual rate of unemployment), maka harus dijaga agar tingkat upah riil sama dengan Marginal Productivity to Labor (MPL). Upah riil menyesuaikan MPL sehingga ketika MPL turun maka upah riil seharusnya juga turun. Tetapi jika tidak terjadi penurunan, maka upah riil tersebut kaku. Semakin lambat mekanisme penyesuaian maka akan semakin lama dan semakin besar efek guncangan negatif terhadap pengangguran, atau pada saat pertumbuhan upah riil lebih tinggi dari pertumbuhan produktivitas perusahaan maka akan menyebabkan pertambahan pengangguran. Di sisi lain, kekakuan upah nominal merupakan kemampuan upah nominal dalam melakukan penyesuaian terhadap harga

c. Sewa modal

Perusahaan-perusahaan menggunakan modal, bersamaan dengan tenaga kerja, untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan mereka adalah memaksimalkan keuntungan. Dalam memutuskan berapa banyak modal yang digunakan dalam produksi, perusahaan harus menyeimbangkan kontribusi yang dihasilkan dari tambahan modal pada pendapatan mereka dengan biaya penggunaan tambahan modal. Produk marjinal modal (marginal product of capital) adalah kenaikan output yang diproduksi dengan menggunakan satu unit tambahan modal dalam produksi. Biaya sewa modal adalah biaya menggunakan satu unit tambahan modal dalam produksi. Bagi

perusahaan, membeli atau menyewa modal, biaya sewa adalah pengukuran yang tepat untuk opportunity cost. Selama nilai marginal product of capital di atas biaya sewa, akan membuat perusahaan menambah stok modalnya. Dengan demikian perusahaan akan tetap berinvestasi hingga nilai output yang diproduksi dari tambahan satu unit tambahan modal sama dengan biaya menggunakan modal tersebut/biaya sewa modal (rental cost of capital).

d. Indeks Harga Implisit (Deflator PDRB)

Indeks Harga Implisit (Deflator PDRB) adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (producer price index). Indeks Harga Implisit juga merupakan indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang biasa dibeli konsumen dalam jumlah yang besar dan biasanya meliputi wilayah yang lebih luas. Indeks Harga Implisit digunakan untuk melihat inflasi dari sisi perekonomian secara makro. Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu Harga Konsumen, Harga Produsen, Harga Perdagangan Besar, Harga Eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap Sektor. Indeks Harga Implisit (IHI) atau PDB deflator diperoleh dengan membagi PDB

nominal (PDB harga berlaku) dengan PDB riil (PDB harga konstan) pada tahun tertentu.

Menurut Sonny Sumarsono permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi, dimana faktor yang mempengaruhi penyerapan akan tenaga kerja adalah

a. Tingkat Upa

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya priduksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga perunit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect.
2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan

kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (substitution effect).

b. Nilai produksi

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual atau sampai ke tangan konsumen. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan atau industri meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang- barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.

c. Nilai Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa

yang tersedia dalam perekonomian. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja atau sumber- sumber serta bahan-bahan dokelola oleh manusia. Pembelian barang modal ini merupakan investasi pada waktu yang akan datang. Nilai investasi ini ditetapkan atas dasar nilai atau harga dari kondisi mesin dan peralatan pada saat pembelian. Investasi ini menentukan skala usaha dari suatu industri kecil yang akan mempengaruhi kemampuan dari usaha tersebut dalam penggunaan faktor produksi yang dalam hal ini berhubungan dengan jumlah investasi yang dilakukan perusahaan yang pada akhirnya menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dimana faktor utama untuk menentukan tingkat investasi adalah sebagai berikut:

1) Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
2) Tingkat bunga.
3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa akan datang.
4) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
5) Keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Dengan demikian besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi pada Industri Kecil dimana investasi yang dilakukan bersifat padat karya, sehingga kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi.

2. Pengertian tenaga kerja

Tenaga kerja adalah setiapa orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut (Mulyadi), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 – 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Menurut (Murti), tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang berusia diatas 15 tahun yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu barang untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

a. Bentuk-bentuk tenaga kerja

Tenaga kerja dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, kerja dalam arti luas (umum), yakni semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi dalam pandangan Islam pengertian kerja sangat luas, mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki oleh manusia. Kedua, kerja

dalam arti sempit (khusus), yakni kerja memenuhi tuntunan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan) yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus menentukan tingkat derajatnya.

b. Status pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha dan menunjukkan tingkat kegiatan yang dilakukannya. Status pekerjaan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1). Buruh/karyawan, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi baik pemerintah atau swasta dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

2). Berusaha sendiri, adalah mereka yang bekerja atas resiko sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh: tukang becak.

3). Berusaha dengan dibantu oleh anggota rumah tangga/buruh tidak tetap, adalah mereka yang dalam melakukan usahanya dibantu oleh anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap.

4). Berusaha dengan buruh tetap / karyawan, adalah mereka yang melakukan usahanya dengan mempekerjakan buruh tetap yang dibayar (sering pula diartikan sebagai majikan). Mengurus Rumah Tangga.

5). Pengusaha dengan bantuan orang lain adalah seseorang yang melakukan pekerjaan/usaha dengan dibantu oleh satu atau

beberapa orang baik anggota rumah tangga lainnya maupun buruh yang di bayar seperti pemilik toko.

6). Pekerja keluarga, adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha untuk memperoleh penghasilan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Seperti: istri yang membantu suaminya ditoko, disawah dan sebagainya.

7). Pekerja sosial adalah mereka yang bekerja tanpa mendapatkan upah/gaji baik berupa uang maupun barang dengan tujuan sosial, seperti: orang-orang yang bekerja mengurus kegiatan sosial seperti: bencana alam, anak yatim piatu dan sebagainya.

c. Kriteria pemilihan pekerjaan

Kriteria pemilihan ekonomi tergantung pada tiga faktor yaitu:

1) Kecakapan tenaga kerja

Kecakapan tenaga kerja adalah usaha tenaga kerja untuk bekerjaan pada industri, keahlian dan ketrampilan yang dimilikinya yang mampu meningkatkan modal. Dalam dunia modern yang mampu meningkatkan modal. Islam menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap memerintahkan umat Islam mengajarkan semua jenis kerja dengan tekun dan sempurna. Para pengusaha dianjurkan agar mengemas setiap produksi dengan baik, menarik dan tahan lama. Umumnya keahlian seorang bergantung kepada kesehatan fisik, mental dan moral, pendidikan dan latihan para pekerja.

2) Mobilitas tenaga kerja

Mobilisasi tenaga kerja ialah gerakan tenaga kerja dari suatu kawasan geografi dan kawasan yang lain. Mobilisasi tenaga kerja mempunyai hubungan yang erat dengan kedudukan ekonomi para pekerja. Jika golongan tenaga kerja boleh bbergerak dengan mudah dan bebas dari satu tempat ke tempat yang lain (pekerja) dimana mereka boleh memperoleh upah yang tinggi, sudah pasti taraf hidup mereka akan dapat diperbaiki.

3) Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja di suatu negara. Pada hakekatnya penduduk terlalu bertambah tapi taraf hidup rakyat di selurh dunia telah bertambah lebih cepat dari pertambahan penduduk tidak akan diikuti oleh pertambahan ekonomi. Dengan berkurangnya ilmu dan teknologi saat ini telah meyakinkan semua orang bahwa manusia mampu mengimbangi pertambahan penduduk dengan penemuan sumber-sumber makanan yang baru.

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja atau manusia.

3. Teori permintaan tenaga kerja

Teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu.

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang karena barang tersebut memberikan kegunaan kepada konsumen. Akan tetapi bagi pengusaha mempekerjakan seseorang bertujuan untuk membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerjatergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Oleh karena itu, permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan turunan.

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, di mana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (price taker). Dalam hal memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Fungsi permintaan tenagakerja diasarkan pada:

a. tambahan hasil marjinal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan seorang pekerja atau istilah lainnya disebut Marjinal Physical Product dari tenaga kerja (MPPL),
b. penerimaan marjinal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau istilah lainnya disebut Marginal Revenue (MR). Penerimaan marjinal disini merupakan besarnya tambahan hasil marjinal dikalikan dngan harga per unit, sehingga MR = VMPPL = MPPL.

c. biaya marjinal, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang pekerja, dengan kata lain upah karyawan tersebut. Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih besar dari biaya marjinal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemberi kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama MR lebih besar dari tingkat upah.

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin besar tenaga kerja yang ditawarkan. Penawaran tenaga kerja sendiri merupakan cerminan dari jumlah tenaga kerja yang mau dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mendapat suatu balas-karya (upah atau gaji, berupa uang atau berupa barang). Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah jumlah penduduk, struktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk yang bersekolah, kondisi perekonomian**.**

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Syaiful (2011) yang berjudul Analisis Sektor Basis Dalam Hubungannya Penyerapan Tenaga

kerja di Kabupaten Batang Hari ,dengan pendekatan sektor pembentuk PDRB. Metode yang dilakukan adalah, *Location Quotient*, dan analisis korelasi *pearson*, Hasil analisis *Location Quotient* menunjukkan bahwa terdapat empat sektor yang menjadi sector basis di Kabupaten Batang Hari, yaitu sektor pertanian, industri, pengolahan, perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa-jasa. Namun hanya dua sektor basis yang pertumbuhanya berkolerasi kuat dan positif dengan penyerapan tenga kerja di Kaupaten Batang hari, Yaitu sektor jasa-jasa dan sekor perdangangan, hotel dan restoran . Pertumbuhan sektor ini bergerak searah dengan tingkata penyerapan tenga kerja pada sektor tersebut. Sementara pertumbuhan sektor pertanian dan sektpr industri pengolahan korelasinya dengan penyerapan tenaga kerja rendah dan sangat lemah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Siti Khanifa (2012) yang berjudul Analisis Pergeseran Struktur Perekonomian dan Penentuan Sektor Unggulan atas Dasar penyerapan Tenaga kerja Di Kabupaten Magelang, dengan pendekatan sektor pembentuk PDRB. Metode yang digunakan adalah *Shift share* klasik dan analisis *Shift Share* Esteban Marquillas. Hasil analisis *shift share* klasik menunujukkan bahwa adanya pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Magelangdari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersiar meskipun tingkat pergeseranya masih relatif kecil. Berdasarkan hasil analisis *shift share* Esteban Marquillas pada penyerapan tenaga kerja di kabupaten magelang, sektor unggulan di kabupaten

magelang yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah tinggi adalah sektor pertanian.

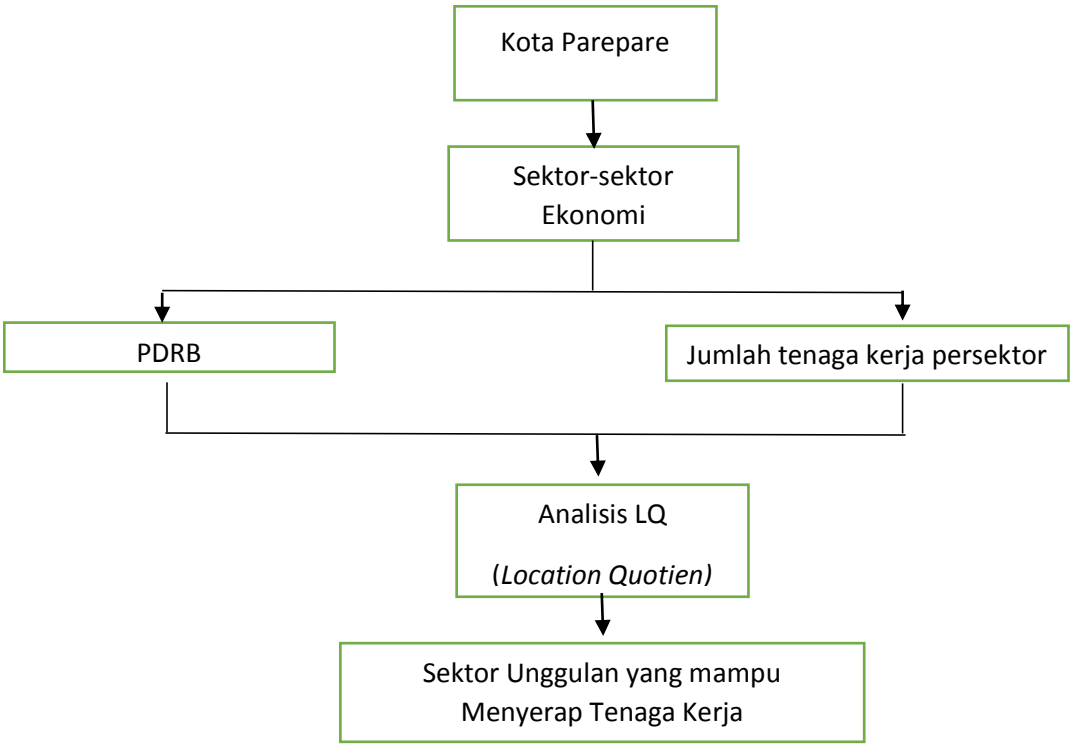
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Gita Iriani Arief (2013) Identifikasi dan peran sektor Unggulan Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, dengan pendekata sektor pembentuk PDRB. Metode yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* dan analisi *Shift share*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang termasuk sektor basis, serta mampu menghasilkan pendapatan dan penyerpan tenga kerja dalam jumlah yang relatif besar di DKI jakarta adalah sektor industri pengolahan, sektor perdangangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan,persewaan dan jasa-jasa, dan sektor jasa-jasa. Sektor perdangangan,hotel dan restoran merupakan sektor ekonomi yang secara riil mampu menyerap tenga kerja dalam jumlah terbesar di DKI jakarta. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terkecil dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor industri pengolahan, sektor perdangangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasidan sektor jasa-jasa adalah sektor unggulan yang memiliki pertumbuhan yang cepat di provinsi DKI jakarta. Sektor ungggulan yang mimliki daya saing yang lebih baik apabilah dibandingkan dengan wilaya lainya hanya sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan ke empat sektor unggulan lainya memiliki daya saing yang kurang baik jika dibandingkan dengan wilaya lain.

Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada judul penelitian yang hanya menggunakan satu variabel bebas. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan dua sampai tiga variabel dan hanya menggunakan satu variabel terikat. Selain itu, penelitian ini menggunakan Kabupaten di Lampung Tengah sebagai objek penelitian, sementara penelitian terdahulu menggunakan Provinsi dan Kota sebagai objek penelitian. Selain itu terdapat perbedaan waktu penelitian, penggabungan hasil penelitian, serta dalam penelitian ini menggunakan atau menjelaskan bagaimana tenaga kerja dalam perspektif Ekonomi

C. Kerangka Konseptual

Berikut penulis sajikan kerangka pikir penelitian untuk menjelaskan alur penelitian, sebagai berikut;

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Berdasarkan gambar kerangka konseptual tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas dan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh pertumbuha ekonomi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di kota parepare.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumya maka penulis mengajukan hipotesis yaitu sebagai berikut;

1. Diduga bahwa sector unggulan di kota parepare tahun 2014-2018 adalah; Sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kontruksi, pedagang besar dab eceran, reparasi mobil dan sepada motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan mkan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuagan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social, jasa lainya.
2. Diduga yang tidak termasuk sector unggulan di kota parepare tahun 2014-2018 adalah; Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, jasa perusahaan.
3. Diduga sector unggulan yang banyak menyerap tenaga kerja di kota parepare tahun 2014-2018 adalah; Pendidikan, Parawisata, jasa

Keuagan, Perdagagan Besar dan Eceran, Jasa Perusahaan, Transportasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat

   Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja (Dinaskertrans) Pemerintah Kota Parepare.

2. Waktu

   Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Maret 2020.

B. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Sedangkan sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu tenaga kerja pada Sektor Unggulan di Kota Parepare dan menarik sampel yaitu:

a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
b. Pertambangan dan Penggalian
c. Industri Pengolahan

d. Listrik, Gas dan Air Bersih

e. Konstruksi

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran

g. Pengangkutan dan Komunikasi

h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

i. Jasa-jasa

C. Definisi Operasional

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono (2011) adalah Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Berikut adalah definisi operasional variabel pada penelitian yang disajikan oleh peneliti:

1. Pertumbuha ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasaj-asa.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri mauapun untuk masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   a. Data Kuantitatif

      Data kuantitatif adalah segala jenis data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikonversi menjadi data angka.

Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah data pertumbuhan ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 3 sumber yaitu:

a. *Person* (individu), merupakan data yang diperoleh dari responden yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.
b. *Paper (data)*, merupakan data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
c. *Place* (tempat), merupakan data yang diperoleh bersumber dari tempat penelitian dalam hal ini Dinaskertrans Kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian yang berkenaan dengan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja guna mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Menurut Sugiyono (2011), observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, dimana tempatnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, dan atau menyelidiki laporan-laporan tertulis seperti majalah, buku, peraturan-peraturan ataupun dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis data

   Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif melalui pendekatan basis ekonomi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah *Location Quotiens.*

2. Analisis Location Quotient.

   Location quotient (LQ) merupakan suatu teknik analisis yang gunakan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sektor disuatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan sektor ekonomi yang sama pada tingkat nasional. Istilah wilayah nasional dapat di artikan untuk wilayah induk atau wilayah atasan. Dalam hal ini, LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah atau tenaga kerja sebuah sektor disuatu daerah (kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor atau tenaga kerja sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi.

Secara umum metode ini menunjukkan lokasi pemutusan atau basis aktivis. LQ dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional. Menganalisis kecenderungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil-hasil kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam lingkungan daerah himpunannya. Analisis LQ berguna untuk membantu menetukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan melihat kemampuan data saing komoditas antar daerah atau dapat juga digunakan meliahat sektor unggulan suatu wilayah.

Data yang yang bisa digunakan untuk analisis ini antara lain data pendapatan (PDRB) dan data tenaga kerja. Analisis LQ pada penelitian ini digunakan untuk menetukan sektor basis perekonomian kota parepare. Location quotient (LQ) merupakan perbandingan kontribusi nilai tambah atau tenaga kerja suatu sektor di kota parepare dan kontribusi nilai tambah atau tanaga kerja sektor sejenis di provinsi sulawesi selatan, dengan formula sebagai berikut.

$$\text{LQ} = \frac{Xij/\,Xi}{Xj/X}$$

Dimana:

LQ_{ij} = Indeks LQ sektor i kota parepare

X_{ij} = PDRB ADHK/ Tenaga Kerja sektor i Kota parepare

X_i = PDRB ADHK/ Tenag Kerja sektor i Provinsi Sulawesi Selatan

X_j = Total PDRB ADHK/ Tenaga Kerja Kota Pareapare

X = Total PDRB ADHK/ Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi selatan

Kriteria pengukuran model tersebut yaitu;

a. Jika nilai LQ > 1, Berarti sektor tersebut merupakan sektor basis,menunjukkan sektor tersebut mampu melayani pasar baik didalam maupun diluar kota parepare.
b. Jika nilai LQ < 1, berarti sektor tersebut bukan merupakan sktor basis, yang menunjukan suatu sektor blum mampu melayani pasar di kota parepare.
c. Jika nilai LQ = 1, berarti suatu sektor bukan mampu melayani pasar di kota parepare saja atau belum dapat memasarkan hasil sekor tersebut keluar daerah lain.

2. Analisis Elastisitas Tenaga kerja

Dalam menganalisis daya serap tenaga kerja masing-masing sektor, maka dilakukan hubungan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang dikenal dengan Elastisitas Tenaga Kerja yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Simanjuntak, 1998):

$$E = \frac{G_n}{G_y} \quad \text{.....} \quad (3.4)$$

dimana:

E = Elastisitas Tenaga Kerja (*Employment Incom Growth Elasticity*)

Gn = Pertumbuhan Tenaga Kerja

Gy = Pertumbuhan Pendapatan (Pertumbuhan PDRB)

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik atau BPS, pada awalnya dinamakan Biro Puast Statistik, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang memiliki fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Badan Pusat Ststistik mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas; akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran yang telah ditetapakan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif. Tahap pengolahan data sangat menetukan seberapa jauh keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Badan Pusat Statistik merupakan intansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak tahun 1960.Sebelum menggunkan komputer, Badan Pusat Statistik mengunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di Badan Pusat Statistik selalau disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga

mengacu kepada kebutuhan.Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. 1980-an, personal komputer telah digunakan diseluruh kantor Badan Pusat Statistik provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer diseluruh kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten dan kota sejak tahun1992.Dengan mengunakan personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupaan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data terkirim ke kantor Badan Pusat Statistik pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di Badan Pusat Statistik pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarkan.

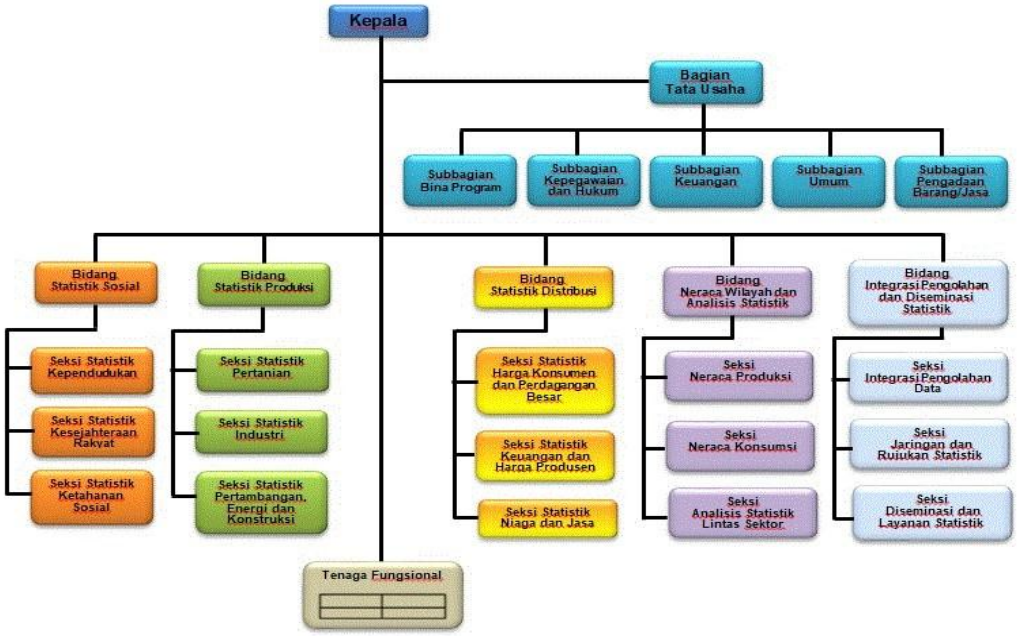
Penggolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data.Efek positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turut bertanggu jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya.Selain itu, penggunaan komputer sangat mendukung Badan Pusat Statistik dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator

yang rumit seperti input-output table, social accounting matrix, danlain-lain.

Dalam pengolahan data Badan Pusat Statistik juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi, dan analisis dengan mengunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer, Badan Pusat Statistik betanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf Badan Pusat Statistik daerah

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di Badan Pusat Stastik didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu menikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan pembaruan / innovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

B. Struktur Organisasi



2.2 struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. Susunan organisasi BPS terdiri dari:

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Bidang StatistikSosial;
4. Bidang StatistikProduksi;
5. Bidang StatistikDistribusi;
6. Bidang Neraca Wilayah dan AnalisisStatistik;
7. Bidang Integrasi Pengolahan dan DiseminasiStatistik;

8. Kelompok JabatanFungsional

Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial.

Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan konstruksi.

Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa.

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor.Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi

pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Visi dan Misi Biro PusatStatistik

Adapun visi Badan Pusat Satistik adalah menjadi sumber informasi statistik sebagai tulang punggung informasi pembangunan nasional dan regional didukung sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang muktahir.

Sedangkan misi Badan Pusat Statistik adalah untuk menjunjung pembangunan nasional Badan Pusat Statistik mengembangkan misi mengarahkan pembangunan statistik pada penyediaan data Statistik yang handal dan bermutu, efektif dan efisien, peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan pengembangan ilmu statistik.

Sedangankan visi dan misi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2015 - 2019 bisa dilihat tabel berikut ini;

Visi : Terpercaya untuk Semua Misi :

1. Menyediakan data Statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupuninternasional.

2. Memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidangstatistik.
3. Membangun insanstatistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuanperstatistikan.

Tujuan :

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminankualitas.
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatanstatistik.
3. Penguatan sistem statistik nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidangstatistik.
4. Peningkatan birokrasi yangakuntabel

D. Kedudukan dan fungsi Badan PusatStatistik

Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggug jawab kepada Presiden (Keppres No.86tahun 1998). Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan beberapa ketentuan perudangan:

1. UU No. 16 tentangstatistik
2. Keputusan Presiden No. 86 tahun 1998 tentangBPS
3. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999 tentang penyelanggaraan statistik

Berdasarkan keputusan Presiden No. 86 tahun 1998 dalam menyelanggarakan statistik dasar melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik adalah:

1. Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan analisis di bidang statistik produksi dan kependudukan serta bidang statistik distirbusi dan neracanasional.
2. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan statistik dengan departemen dan instansi lainya dalam mengembangkan berbagai jenis statistik yang diperlukan, serta pelaksanaan kerjasama di bidang statistik dengan lembaga/organisasi lain baik di dalam maupun luarnegeri.
3. Penyajian data kepada pemerintah dan masyarakat dari hasil kegiatan statistik produksi dan kependudukan serta statistik distribusi dan neraca nasional secara berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun dari data sekunder.
4. Penyebarluasan statistik melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung.
5. Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan organisasi, perlengkapan dan perbekalan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan PusatStatistik.

6. Penyelenggaran pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tatalaksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumahtangga.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penggunaan data dalam penelitian ini dengan data jenis *time series*. Data tersebut menggunakan data dari tahun 2014- 2018. Data penelitian ini diperoleh melalui BPS Kota Parepare dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tenaga Kerja Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku 2013 merupakan variabel yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian.

1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Parepare dan Sulawesi Selatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu, adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Parepare dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Parepare
Tahun 2014-2019

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	214.792	235.795	259.585	282.480	306.041	323.073
2	Pertambangan dan Penggalian	9.145	9.986	10.811	11.087	11.353	11.304
3	Industri Pengolahan	77.733	82.511	88.015	93.628	95.732	103.614
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.887	3.744	4.046	4.301	4.646	4.904
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.772	11.151	11.538	12.540	13.547	13.955
6	Konstruksi	536.794	554.132	576.311	601.827	640.812	689.151
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	586.036	613.678	661.006	711.362	777.251	830.798
8	Transportasi dan Pergudangan	204.999	215.754	226.614	245.423	266.204	290.109
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	206.935	226.485	248.257	272.337	303.385	323.425
10	Informasi dan Komunikasi	254.436	269.950	289.855	309.379	340.329	361.143
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	266.494	296.180	351.944	372.422	382.998	390.771
12	Real Estate	334.325	364.147	389.292	428.439	449.620	465.560
13	Jasa Perusahaan	9.607	10.171	10.780	11.485	12.435	13.196
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391.524	409.275	407.016	420.810	358.221	409.956
15	Jasa Pendidikan	243.053	253.626	265.220	279.259	304.132	321.799
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.419	175.346	190.354	208.634	229.001	239.917
17	Jasa lainnya	104.947	111.786	117.163	128.911	143.697	155.114
	Total PDRB	**3.615.899**	**3.843.716**	**4.107.806**	**4.394.324**	**4.639.405**	**4.947.790**

Sumber: BPS Parepare 2020

Pada tabel 5.1 periode 2014-2019 PDRB Kota Parepare berdasarkan harga dasar berlaku menunjukkan perkembangan yang cukup singnifikan. Nilai PDRB Kota Parepare pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.615.899 Milyar rupiah, pada tahun 2015 PDRB Kota Parepare

sebesar Rp 3.843.716 Milyar Rupiah, pada tahun 2016 PDRB Kota Parepare sebesar Rp 4.107.806 Milyar Rupiah, pada tahun 2017 PDRB Kota Parepare sebesar Rp 4.394.324 Milyar Rupiah, pada tahun 2018 PDRB Kota Parepare sebesar Rp 4.639.405 Milyar Rupiah dan pada tahun 2019 PDRB Kota Parepare sebesar Rp 4.947.790 Milyar Rupiah.

Adapun pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan dapan dilihat padatabel 5.2sebagai berikut:

Tabel 5.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2019

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51.101,68	54.099,10	58.351,27	61.597,20	64.874,40	66.658,84
2	Pertambangan dan Penggalian	14.712,01	15.802,95	15.996,26	16.604,14	16.778,09	17.237,90
3	Industri Pengolahan	33.293,32	35.547,21	38.473,77	40.407,19	40.788,01	44.832,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	233,67	230,44	256,98	272,65	292,44	310,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	301,83	302,86	319,33	344,53	366,97	369,70
6	Konstruksi	27.666,60	29.967,28	32.070,16	34.873,99	37.872,19	41.232,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.363,41	34.915,41	38.257,38	42.245,01	47.132,15	51.442,42
8	Transportasi dan Pergudangan	8.558,71	9.142,46	9.851,28	10.675,51	11.777,68	11.982,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.185,02	3.370,06	3.655,58	4.091,98	4.612,02	4.895,97
10	Informasi dan Komunikasi	14.560,09	15.712,60	16.989,31	18.776,94	21.028,66	23.339,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.065,15	8.662,54	9.842,96	10.275,00	10.754,89	11.186,15
12	Real Estate	8.564,51	9.197,42	9.783,67	10.222,29	10.695,90	11.276,11
13	Jasa Perusahaan	1.000,75	1.059,53	1.142,99	1.239,45	1.363,67	1.507,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.531,97	11.362,13	11.337,29	11.926,34	13.114,34	14.423,36
15	Jasa Pendidikan	12.473,45	13.378,00	14.295,97	15.685,09	17.217,12	18.410,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.432,71	4.845,17	5.254,63	5.717,08	6.208,38	6.708,17

17	Jasa lainnya	2.943,17	3.207,83	3.522,50	3.859,79	4.366,71	4.791,50
	Total PDRB	**233.988,05**	**250.802,99**	**269.401,31**	**288.814,17**	**309.243,63**	**330.605,12**

Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2020

Pada tabel 5.1 periode 2014-2019 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan harga dasar berlaku menunjukkan perkembangan yang cukup singnifikan. Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sebesar Rp. 233.988,05 Triliun, pada tahun 2015 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 250.802,99 Triliun Rupiah, pada tahun 2016 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 269.401,31 Triliun, pada tahun 2017 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 288.814,17 Triliun, pada tahun 2018 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 309.243,63 Triliun dan pada tahun 2019 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 330.605,12Triliun.

2. Kondisi Ketenagakerjaan

Data tentang distribusi penyerapan tenaga kerja menurut sektor dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan juga sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Tahapan kemajuan perekonomian suatu daerah dari tradisional menuju industri, salah satunya ditandai dengan adanya transformasi sektor tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan demikian persentase tenaga kerja di sektor primer akan menurun dan sebaliknya di sektor sekunder atau tersier akan

meningkat, adapun tingkat penyerapan tenaga kerjadi Kota Parepare dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Penyerapan Tenaga Kerja Kota Parepare
Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
pertnanian kehutanan, perburuan dan perikanan	1.405	3.022	3.022	2.388	2.205
Industri	3.973	2.550	2.550	4.879	6.473
Perdagangan	20.657	18.848	18.848	25.610	24.107
Jasa-jasa	16.904	15.936	15.936	16.496	15.729
Lain-lain	11.873	14.243	14.243	14.320	13.397
Total Tenaga Kerja	**54.812**	**54.599**	**54.599**	**63.693**	**61.911**

Sumber: BPS Kota Parepare 2020

Pada tabel 5.3 diketahui penyerapan tenaga kerja Kota Parepare dari tahun 2014 sampai pada tahun 2018 yakni, pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja Kota Parepare sebesar **54.812** tenaga kerja dari lima sektor yang ada, pada sektor pertnanian kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 1.405 tenaga kerja, pada sektor Industri 3.973, tenaga kerja pada sektor Perdagangan sebesar 16.904, tenaga kerja pada sektor jasa sebesar 16.904 tenaga kerja dan lapangan usaha lain-lain sebesar 11.873 tenaga kerja.

Pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja Kota Parepare sebesar **54.599** tenaga kerja dari lima sektor yang ada, pada sektor pertnanian kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 3.022 tenaga kerja, pada sektor Industri 2.550, tenaga kerja pada sektor Perdagangan sebesar 18.848, tenaga kerja pada sektor jasa sebesar 15.936 tenaga kerja dan lapangan usaha lain-lain sebesar 14.243

tenaga kerja, begitupun jumlah tenaga kerja pada tahun 2016 sama dengan tahun 2015.

Pada tahun 2017 penyerapan tenaga kerja Kota Parepare sebesar **63.693** tenaga kerja dari lima sektor yang ada, pada sektor pertnanian kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 2.388 tenaga kerja, pada sektor Industri 4.879, tenaga kerja pada sektor Perdagangan sebesar 25.610, tenaga kerja pada sektor jasa sebesar 16.496 tenaga kerja dan lapangan usaha lain-lain sebesar 14.320 tenaga kerja.

Pada tahun 2018 penyerapan tenaga kerja Kota Parepare sebesar **61.911** tenaga kerja dari lima sektor yang ada, pada sektor pertnanian kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 2.205 tenaga kerja, pada sektor Industri 6.473, tenaga kerja pada sektor Perdagangan sebesar 24.107, tenaga kerja pada sektor jasa sebesar 15.729 tenaga kerja dan lapangan usaha lain-lain sebesar 13.397 tenaga kerja.

B. Analisis Penelitian

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor ekonomi unggulan di kota parepare digunakan tiga macam alat analisis yaitu analisis *Location Quotient* (LQ), analisis elastisitas tenaga kerja dan analisis koefisien tenaga kerja.

1. Analisis *Location Quotient* (*LQ*)

Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) yang dilihat dari sisi penciptaan nilai tambah seperti terlihat pada Tabel 5.4 untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Kota Parepare. Sektor basis dalam Hal ini berarti sektor tersebut mampu melayani pasar baik di dalam maupun di luar Kota Parepare. Hal ini berarti subsektor ini merupakan kegiatan ekonomi daerah yang mempunyai keunggulan komparatif untuk dikembangkan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah di Kota Parepare, adapun hasil Analisis *Location Quotient* (*LQ*) PDRB Kota Parepare dari tahun 2014 sampai pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Nilai *Location Quotient* (LQ) Kota Parepare
dari tahun 2014 sampai pada tahun 2019

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,2720	0,2844	0,2918	0,3014	0,3144	0,3238	0,2980
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0402	0,0412	0,0443	0,0439	0,0451	0,0438	0,0431
3	Industri Pengolahan	0,1511	0,1515	0,1500	0,1523	0,1564	0,1544	0,1526
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,0764	1,0602	1,0326	1,0369	1,0590	1,0550	1,0534
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,3095	2,4023	2,3697	2,3922	2,4607	2,5222	2,4094
6	Konstruksi	1,2555	1,2066	1,1785	1,1342	1,1278	1,1168	1,1699
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,1718	1,1468	1,1331	1,1067	1,0992	1,0791	1,1228
8	Transportasi dan Pergudangan	1,5500	1,5398	1,5086	1,5110	1,5066	1,6177	1,5390
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,2044	4,3852	4,4538	4,3742	4,3847	4,4140	4,3694

10	Informasi dan Komunikasi	1,1308	1,1210	1,1189	1,0829	1,0788	1,0339	1,0944
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,1382	2,2310	2,3450	2,3822	2,3737	2,3342	2,3007
12	Real Estate	2,5261	2,5834	2,6095	2,7547	2,8020	2,7588	2,6724
13	Jasa Perusahaan	0,6212	0,6264	0,6185	0,6090	0,6078	0,5850	0,6113
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,4056	2,3504	2,3545	2,3190	1,8207	1,8992	2,1916
15	Jasa Pendidikan	1,2609	1,2370	1,2167	1,1702	1,1774	1,1679	1,2050
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,3419	2,3614	2,3758	2,3985	2,4587	2,3898	2,3877
17	Jasa lainnya	2,3075	2,2738	2,1814	2,1951	2,1935	2,1631	2,2191

Sumber: Data di olah dari excel

Pada tabel 5.5 Nilai Analisis *Location Quotient* (LQ) dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena sektor tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan didalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi didaerah lain.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ yang terdiri dari tujuh sektor didalam PDRB Kota Parepare periode tahun 2014-2019, maka dapat teridentifikasikan sektor basis dan non basis sebagai berikut:

Terdapat empat sektor NonBasis didalam PDRB Kota Parepare Yaitu Pertanian, Ketuhanan, Dan Perikanan; Pertambagan dan Penggalian; Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan. Keempat sektor ini memiliki nilai LQ > 1 (Lebih besar dari angka satu) yang artinya sektor tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan yang ada di Kota Parepare tetapi juga dapat diekspor ke daerah lain.

Terdapat tiga belas sektor basis yaitu pengadaan listrik dan Gas; Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; kontruksi; Perdagangan besar dan ecer; Reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; Real Estatet; Administarsi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; Jasa lainnya. Tiga belas sektor memiliki nilai LQ < 1 (lebih kecil dari angkat satu) artinya sektor ini belum mampumencukupi kebutuhan yang ada di kota Parepare dan cenderung mengimpor. Di dalam PDRB kota parepare tidak terdapat sektor yang nilai LQ = 1 (sama dengan satu) yang artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

2. Analisis Elastisitas Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menjadi hal yang positif dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di Kota Parepare. Namun pertumbuhan ekonomi ini juga harus diiringi dengan pertumbuhan tenaga kerja yang baik. Hal ini antara lain tercermin pada nilai elastisitas tenaga kerja yang ada pada table 5.6 sebagai berikut:

Tabel 5.7
Nilai Elastisitas Tenaga Kerja Kota Parepare
Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Elastisitas Tenaga Kerja				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
pertnanian kehutanan, perburuan dan perikanan	0,00038856	0,000786	0,000736	0,000543	0,000475
Industri	0,00109876	0,000663	0,000621	0,00111	0,001395
Perdagangan	0,00571283	0,004904	0,004588	0,005828	0,005196
Jasa-jasa	0,00467491	0,004146	0,003879	0,003754	0,00339
Lain-lain	0,00328355	0,003706	0,003467	0,003259	0,002888
Total	**0,01515861**	**0,014205**	**0,013292**	**0,014494**	**0,013345**

Sumber: Data di olah dari excel

Berdasarkan analisis elastisitas tenaga kerja, dapat diketahui seberapa besar dampak pengembangan sektor basis di suatu daerah terhadap penyerapan tenaga kerja. Selama periode 2014-2018, ketiga sektor unggulan yaitu sektor pertanian serta sektor jasa dan perdagangan mengalami penurunan elastisitas tenaga kerja. Hal ini berarti tiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen mengakibatkan daya serap tenaga kerja di ketiga sektor ini yang semakin menurun.

Selama periode 2014-2018, sector jasa dan perdagangan adalah penyumbang nilai tambah terbesar. Meskipun demikian tingkat elastisitas kesempatan kerja terhadap nilai tambah untuk sektor. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan nilai tambah sektor jasa dan perdagangan yang tinggi tidak menjamin terciptanya kesempatan kerja. Karena pertumbuhan sektor tersebut antara lain dipengaruhi oleh konsumsi dan investasi.

C. Pembahasan

Secara terperinci hasil analisis dalam penelitian ini yaitu, analisis analisis *Location qoutiten* (LQ) dan analisis Elastistas Tenaga Kerja, maka berdasarkan pengamatan terhadap setiap sektor dapat kita tarik kesimpulan dari analisis PDRB dan Ketenagakerjaan Kota Parepare.

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Kegiatan pembangunan ekonomi pada suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor PDRB, dimana dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB yang merupakan kontribusi dari masing masing sektor yang terdapat di daerah tersebut sekaligus mencerminkan produktifitas dari masing-masing sektor.

Pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang tercantum pada PDRB, Kota Parepare masyarakatnya sangat bergantung pada salah satu sector dalam PDRB, yaitu pertanian, khutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan jasa perusahaan, selain mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah keempat sektor tersebut memiliki peranan perkembangan structural pada perekonomian suatu daerah, yaitu dapat mempengaruhi sektor lainnya sehingga dapat mambuka peluang lapangan pekerjaan.

Untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB, Pembangunan keempat sektor yakni pertanian, khutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan jasa perusahaan berpotensi dalam menyelesaikan masalah kesempatan kerja yang terbatas dan peranannya sebagai penampung kerja. Keempat sektor merupakan salah satu kegiatan usaha yang harus dikembangkan dan dibina agar dapat memperluas lapangan pekerjaan. Selain itu sektor yang ada didalam PDRB memiliki arti penting bagi perekonomiaan Kota Parepare, dikarenakan sektor - sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Dengan pertumbuhan keempat Sektor yang pesat maka akan menyebabkan sektor-sektor lainnya juga akan terkena dampaknya, misalnya dengan tingginya sector pertanian, khutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan jasa perusahaan maka akan membutuhkan bahan baku yang bisa didapat dari sektor Pertanian atau bahkan Sektor Pertambangan dan Penggalian, selain itu dengan pesatnya Industri Pengolahan akan manciptakan tumbuhnya pabrik-pabrik baru dan tentunya akan menyerap tenaga kerja dan maempengaruhi penerimaan dari sektor tersebut.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gita Iriani Arief (2013) Identifikasi dan peran sektor Unggulan Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, dengan pendekata sektor pembentuk PDRB. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang termasuk sektor basis, serta mampu menghasilkan pendapatan dan penyerpan tenga kerja dalam jumlah yang relatif besar di DKI jakarta adalah sektor industri pengolahan, sektor perdangangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan,persewaan dan jasa-jasa, dan sektor jasa-jasa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan memeproleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat empat sektor NonBasis didalam PDRB Kota Parepare Yaitu Pertanian, Ketuhanan, Dan Perikanan; Pertambagan dan Penggalian; Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan. Keempat sektor ini memiliki nilai LQ > 1 (Lebih besar dari angka satu) yang artinya sektor tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan yang ada di Kota Parepare tetapi juga dapat diekspor ke daerah lain.
2. Berdasarkan analisis elastisitas tenaga kerja, dapat diketahui seberapa besar dampak pengembangan sektor basis di suatu daerah terhadap penyerapan tenaga kerja. Selama periode 2014-2018, ketiga sektor unggulan yaitu sektor pertanian serta sektor jasa dan perdagangan mengalami penurunan elastisitas tenaga kerja. Hal ini berarti tiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen mengakibatkan daya serap tenaga kerja di ketiga sektor ini yang semakin menurun.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan pada bagian sebelumnya maka saran-saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Parepare perlu mengembangkan berbagai sektor unggulan yang ada tanpa mengabaikan sektor NonBasis, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan serta tingkat penerimaan PDRB di Kota Parepare.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Tenaga Kerja) terutama di sektor Pertanian, Ketuhanan, Dan Perikanan; Pertambagan dan Penggalian; Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan sehingga melahirkan tenaga-tenaga ahli yang dapat mengelola sumberdaya lokal yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia.* Jakarta: Erlangga.

Barthos, Basir. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro.* Jakarta: Bumi Aksara.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Ekonomika Pembanguanan Masalah, Kebiajakan dan Politik*. Jakarta. Erlangga.

Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomi Industri Indonesia.* Yogyakarta: ANDI.

Mulyadi. 2014. *Akuntansi Biaya, Edisi Kelima.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

Ponto Maria. 2010. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jayapura*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulagi, Manado

Rachbini, Didi J. 2004. *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan.* Jakarta: Jakarta Granit.

Robinson, Tarigan. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Rakhmawati Atifatur. 2010. *Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol.2.jilid 1.2018

Sirojuzilam. 2010. *Regional. Pembagunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: Universitas Sumatra Utara Press.

Sobita, Nindya Eka dan I Wayan Suparta. 2014. "*Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja diprovinsi lampung*" Jurnal Ekonomi Pembaguanan. Vol.0. No 2, Juli 2014.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P, dkk. 2008. *Pembangunan Ekonom,Edisi Kesembilan.* Jakarta: Erlangga.

Alhiriani. 2013. *Pengaruh investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di sulawesi selatan*. Fakultas Ekonomo dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.

Kaiyung Al. 2016. *Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri parwisata di kota parepare*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiya Parepare.

Taringan Robinson, 2006, *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi.* Medan, PT. Bumi Askara.

Junaedi. 2016. *Analisis pengaruh investasi, belanja pemerintah, penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi selatan*. Fakultas Ekonomi. Univertsitas Negri Makassar.

Nunung Roh Nur 2018. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.